PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DALAM MEMPERJUANGKAN KEMBALINYA RIS KE NKRI 1945-1951

Oleh : Reni Juwita, Drs. Budi Purnomo, M.Hum.,M.Pd

Nelly Indrayani, S.Hum.,M.Hum

Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi

Email : rennijuwitajuwita@gmail.com

ABSTRAK

Kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk menuntut kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan asing, sehingga akhirnya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah kemerdekaan itu Belanda tetap ingin menancapkan kekuasaannya kembali, dan terjadilah ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang selanjutnya mengiring kedua negara tersebut ke perjanjian Meja Bundar sehingga di sepakati dibentuknya RIS, hal ini mengakibatkan negeri terpecah pecah. Tujuan dari penelitian ini adalah:1) untuk mengetahui kondisi negara Republik Indonesia Serikat;2) mengetahui pemikiran Muhammad Natsir dalam memperjuangkan negara RIS ke NKRI; 3) mengetahui implementasi pemikiran muhammad Natsir dalam memperjuangkan kembalinya RIS ke NKRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) Diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) telah membawa Indonesia kedalam perpecahan, indonesia di bagi menjadi beberapa negara bagian, karena kebijakan tersebut terjadilah gejala gejala diberbagai pelosok negeri karena tidak terima dengan sitem federal tersebut yang dianggap sebagai warisan kolonial. 2) Pemikiran Muhammad Natsir dalam mengatasi kekacauan yang terjadi di negeri ini adalah suatu perjuangan yang sangat besar dimana ia menghabiskan waktu selama dua setengah bulan untuk melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin lain agar di bentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setelah melakukan pembicaraan dengan pemimpin tersebut akhirnya Muhammad Natsir menyampaikan hasil dari pemikirannya dalam pidato parlemen RIS yang dinamakan dengan Mosi Integral. Jadi Mosi Integral ini adalah suatu dorongan pada pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan di negara bagian dengan menciptakan satu kesatuan yang utuh. 3) Pemerintah menerima Mosi Inegral tersebut dengan membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian hanya kurang lebih 4 setengah bulan dari pencetusan Mosi Integral tersebut maka Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) telah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak dari Mosi Integral ini adalah pembubaran negara bagian, pembentukan kembali negara kesatuan, perubahan konstitusi, dan perubahan sitem pemerintahan.

Kata Kunci : Muhammad Natsir , Pemikiran, RIS, NKRI

A. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa ini menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia, karena dengan Proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaannya sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan Indonesia tidak didapat sebagai hadiah dari bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menuntut kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan asing.¹ Sehingga akhirnya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).²

Setelah kemerdekaan itu Belanda tetap menekan Indonesia dan ingin menancapkan kekuasaannya kembali. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin hebat mendorong Inggris yang merasa bertanggung jawab atas masuknya Belanda ke Indonesia. Akhirnya, pihak Belanda mencapai kesepakatan diplomatik mereka

yang pertama dengan Republik pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak tercapainya suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember.³

Peristiwa di atas mengakibatkan meletusnya konfrontasi RI-Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Konfrontasi ini Belanda berusaha melemahkan RI dengan cara, pengepungan ibukota RI dan penghapusan dari peta. Dalam arti menghilangkan secara de facto RI serta perebutan daerah-daerah RI.⁴ Belanda melancarkan aksi mereka dengan menguasai semua pelabuhan perairan-perairan di Jawa, dan menguasai perkebunan di Sumatra. Belanda ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyetujui aksi tersebut, sehingga Amerika dan Inggris mengiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.⁵

¹ Haryono Rinardi. “ Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia”. Vol 2, No. 1, 2017, Halm 143-150.

² Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Muhammad Natsir*. Yogyakarta : Suluh Media, 2017, Halm 62-63

³M.C. Ricklef.*Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta; Bulaksumur, 1991. Halm 337

⁴ Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 2* , Kanisius , Yogyakarta 1991, Halm 15

⁵M.C. Ricklef. *Op. Cit.*, Halm 338-339

PBB mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda yakni pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 diselenggarakanlah suatu Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Akibatnya terbentuklah Negara *Republik Indonesia Serikat* (RIS) dan Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Soekarno menjadi Presiden RIS dan Hatta sebagai perdana menteri merangkap wakil Presiden (1949-1950).

Berubahnya Negara kesatuan menjadi Negara Serikat pada hakikatnya tidak hanya disebabkan oleh adanya campur tangan pihak luar yakni Belanda dan PBB akan tetapi kondisi intern Indonesia juga memberikan Kontribusi terbentuknya negara Federal. Banyak daerah-daerah yang melakukan pemberontakan, salah satunya PRRI (Permesta) dan pemberontakan yang dilakukan oleh personil-personil Angkatan Darat yang ditempatkan di daerah, seperti Kol.Simbolon. Perlawanan daerah-daerah inilah yang ikut memicu berubahnya Indonesia ke bentuk Negara Serikat.

Sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang. Pengakuan kedaulatan yang dilakukan itu justru mendorong gerakan persatuan yang bukan saja muncul

dikalangan elit Indonesia, tetapi juga dikalangan masyarakat bawah sendiri. Dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI) yang sesungguhnya tidak lebih dari satu diantara 32 negara bagian yang ada, pada dasarnya masih tetap otonom. Kondisi itu terlihat karena secara administrasi RI tidak bergabung dengan RIS. Hal itu lebih diperparah lagi, dengan banyaknya pegawai negeri sipil dalam negara-negara bagian, seperti Jawa Tengah, Jawa timur dan Pasundan yang lebih menataati aturan-aturan dari Ibukota RI Yogyakarta dibandingkan Jakarta. Keadaan itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan. Pembentukan negara-negara bagian diberbagai wilayah Indonesia oleh Belanda, pada dasarnya eksistensinya tidak pernah diakui oleh pemerintahan RI di Yogyakarta. Tindakan yang kemudian diambil oleh Pemerintah RI adalah mendirikan pemerintah bayangan di negara-negara bagian.⁶

Kuatnya gerakan persatuan itu kemudian semakin bertambah karena mayoritas masyarakat negara bagian juga tidak mendukung pembentukan negara-negara bagian tersebut. Negara-negara bagian lain

⁶Haryono Rinardi. *Op. Cit.*, Halm 182-183

mulai bergejolak, Negara bagian yang memelopori pembubaran pemerintahannya adalah Pasundan. Keadan itu sebagian disebabkan kurang mampunya Pemerintah Pasundan untuk memelihara keamanan dan ketertiban diwilayahnya dan kondisi ini makin memburuk ketika terjadi peristiwa wasterling di Bandung pada awal 1950. Semua kondisi itu telah merusak kedudukan dan reputasi kaum federalis. Apalagi sejak peristiwa Wasterling timbul keyakinan dikalangan masyarakat bahwa beberapa pejabat tertentu Pemerintah pasundan telah mengadakan semacam perjanjian dengan Wasterling. Tuduhan itu menguat karena adanya kenyataan bahwa sejumlah anggota Pemerintahan Pasundan ternyata berkebangsaan Belanda.⁷ Akhirnya pada 30 Januari 1950, Kabupaten Sukabumi mengeluarkan resolusi yaitu lepas dari Negara Pasundan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Gejolak yang sama terjadi di Negara Sumatra Timur. Di sini malah terjadi demonstrasi-demonstrasi disertai kekacauan yang membuat polisi harus bertindak.

Selanjutnya, Muhammad Natsir melihat bahwa Negeranya pasca perjanjian Meja Bundar yang menyepakati dibentuknya

Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah membahayakan bagi bangsa dan Negara. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping Negara federal Republik Indonesia Serikat. Sesuai dengan pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu Negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat.

Hal ini mengakibatkan negeri terpecah pecah menjadi Negara serikat sebagaimana yang diharapkan penjajah Belanda. M. Natsir dengan pikiran yang brilian mencoba menyelamatkannya.⁸ Mosinya yakni merangkai kembali Indonesia sebagai Negara kesatuan yang utuh yang telah berjalan lebih 50 tahun lamanya, namun dalam beberapa tahun terakhir terancam tercabik cabik. Bagi bangsa Indonesia, mosi bukan hanya konsep atau produk pemikiran biasa hal ini merupakan Jasa M. Natsir untuk menghindari disintegrasi, hal ini dianggap sebagai langkah cerdas dalam menyelamatkan keutuhan bangsa.

Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk menelaah lebih jauh tentang pemikiran M. Natsir. Berdasarkan latar

⁷Ibid., Halm 184-185

⁸ M. Natsir, *Capita Selecta* 2. Djakarta: Pustaka Pendis 1957. Hal 7

belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul” **Pemikiran Muhammad Natsir dalam Memperjuangkan Kembalinya RIS ke NKRI 1945-1951**” dimana penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai Karir politik dan Pemikiran Muhammad Natsir dalam memperjuangkan kembali bentuk Negara yaitu dari RIS ke NKRI.

B. METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Jenis penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian kualitatif, sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (eyewitness). Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang merupakan karangan Muhammad Natsir yang berjudul *Capita Selecta 2*.

sumber sejarah sekunder disampaikan bukan oleh orang yang menyaksikan sendiri suatu peristiwa sejarah. Penulis sumber sekunder bukanlah orang yang hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa, ia melaporkan apa yang terjadi berdasarkan kesaksian orang lain. Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, dan jurnal.

Setelah melakukan pengumpulan sumber-sumber selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Pada tahap Kritik Eksternal adalah menguji keaslian sumber sejarah atau dokumen agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu sumber yang asli biasanya waktu dan tempatnya diketahui. Ditahap kritik internal penulis melakukan seleksi terhadap informasi yang terdapat di dalam sumber yang penulis dapatkan selanjutnya mengadakan penilaian terhadap sumber yang diperoleh dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mencari data yang lebih akurat yang berkaitan tema penelitian. Selanjutnya penulis menafsirkan keterangan-keterangan berupa fakta yang diperoleh dari hasil tahapan sebelumnya baru kemudian memasuki tahapan akhir yaitu Penulisan sejarah (historiografi).

C. Pembahasan

1. Kondisi Negara Republik Indonesia

PBB mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda yakni pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 diselenggarakanlah suatu Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Akibatnya terbentuklah Negara *Republik Indonesia Serikat* (RIS) dan Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Soekarno menjadi Presiden RIS dan Hatta sebagai perdana menteri merangkap wakil Presiden (1949-1950). Sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang. Pengakuan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, itu justru mendorong gerakan persatuan yang bukan saja muncul di kalangan elit Indonesia. Tetapi juga di kalangan masyarakat bawah sendiri. Hal tersebut dikarenakan banyak bangsa Indonesia yang menganggap sistem federal adalah warisan kolonial.⁹ Banyak pegawai negeri sipil dalam negara bagian lebih taat kepada aturan-aturan dari ibukota RI Yogyakarta, dari pada Jakarta. Kondisi itu menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan. Keadaan itu sesungguhnya merupakan bentuk manifestasi politik pada masa

sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda serta eksistensinya tidak pernah diakui oleh RI di Yogyakarta. Selain itu RI mendirikan pemerintahan daerah bayangan dari desa sampai ke kota. Kondisi itu semakin diperparah dengan kuatnya kelompok republiken di tubuh kabinet Perdana Menteri Muhammad Hatta. Soekarno dan kaum republiken lainnya dalam tubuh pemerintah RIS banyak memberikan dorongan semangat kepada gerakan penyatuan di berbagai daerah atau negara bagian. negara-negara bagian lain mulai bergejolak. Kaum republiken dari berbagai pelosok negeri menyampaikan aspirasi kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan rakyat daerah Malang mencetuskan resolusi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Selain itu kabupaten Sukabumi mengeluarkan resolusi serupa lepas dari negara Pasundan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Gejolak yang sama terjadi di Negara timur. Disini malah terjadi demonstrasi besar-besaran disertai kekacauan yang membuat polisi harus bertindak.

2. Pemikiran Muhammad Natsir dalam Memperjuangkan Konsep Negara RIS Ke NKRI

⁹ Haryono rinardi. *Op. Cit.* Vol 2. No 1

Sepanjang dua setengah bulan, M. Natsir melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain untuk dapat menyelesaikan persoalan terhadap negara pada waktu itu Muhammad Natsir berbicara dengan semua kalangan anggota RIS dari pembicaraan dengan mereka maka Muhammad Natsir berkesimpulan bahwa perlu adanya penyelesaian secara menyeluruh atau integral dengan baik dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa. Atas keberatan beberapa negara bagian tersebut kemudian Muhammad Natsir mengajukan gagasan agar semua negara-negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya. Adapun cara yang ditempuh adalah semua negara bagian sama-sama membentuk Negara Kesatuan dengan jalan semua negara bagian harus membubarkan diri masing-masing. Usul Muhammad Natsir tersebut dianggap masuk akal sehingga dengan mudah diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS dan sebagai komitmen atas penerimaan gagasan Muhammad Natsir tersebut maka 11 anggota DPR RIS dari berbagai fraksi memberikan dukungan tandatangan untuk diajukan dalam sidang pada tanggal 3 April 1950, Muhammad Natsir tampil di podium sidang paripurna

Parlemen RIS untuk menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir.¹⁰ Berkaitan dengan Mosi Integral Natsir diatas maka terkandung 2 unsur yang dijelaskan masing-masing yakni “Mosi” dan “Integral”. Istilah mosi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah suatu pernyataan atau sikap seseorang dalam menyikapi lingkungan. Mosi yang diajukan Muhammad Natsir adalah bukan merupakan mosi tidak percaya pada pemerintah namun merupakan suatu dorongan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan negara bagian. Sedangkan Integral bearti mengaitkan eksistensi sesuatu objek dengan keseluruhan objek yang lebih luas dalam satu struktur, jadi pengintegrasian ialah tindakan menciptakan suatu kesatuan organis, utuh dan bulat, namun tidak ada bagian yang keberadaannya otonom, tersendiri lepas dari bagian-bagian lainnya.¹¹

Adapun dasar pertimbangan mosi integral tersebut adalah bahwa: Pertama, Proklamasi kemerdekaan Neagara Indonesia yang telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan negara kesatuan yang ditandan tangani oleh Soekarno-Hatta sebagai atas nama bangsa

¹⁰ Roni tabroni . *Op. Cit.*, Halm 149

¹¹ Ahmad Murjoko, Mosi Integral Natsir , Bandung : persis pers , Halm 88

Indonesia. Kedua masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada kedua proklamator tersebut. Ketiga pemerintah Republik Indonesia telah kembali ke ibu kota Negara Indonesia yakni pada tanggal 27 Desember 1949 setelah sebelumnya berada di Yogyakarta dari tanggal 3-4 Desember 1949.

Kempat, untuk membentuk negara baru sesudah Republik Indonesia Serikat (RIS) juga diperbolehkan menurut konstitusi RIS. Kelima, Republik Indonesia berkebebasan membentuk daerah Renville beberapa provinsi Republik Indonesia bertipe Provincial state sebagai Pelaksanaan unitarisme desentralisasi. Keenam, bertujuan untuk menyederhanakan ketatanegaraan agar menghemat keungan dan memenuhi keinginan Rakyat. Ketujuh, Mosi tersebut telah sejalan dengan peraturan Tata Tertib Konstituante Indonesia dan Kedelapan, Mosi Integral tersebut mendapat dukungan tanda tangan 11 orang anggota DPR RIS.

3. Implementasi Pemikiran Natsir Dalam Memperjuangkan Kembalinya RIS Ke NKRI

Akhirnya Muhammad Natsir mengajukan mosi integral nya kepada pemerintah yang berbunyi:

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RIS dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penjelasan yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu yang akhir-akhir ini.

MEMPERHATIKAN: suara-suara rakyat dari berbagai daerah dan mosi-mosi Dewan Perwakilann Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia.

Kompak untuk menampung segala akibat-akibat yang tumbuh karenanya, dan persiapan-persiapan untuk itu harus diatur begitu rupa, dan menjadi program politik dari pemerintah yang bersangkutan dan dari pemerintah RIS.

MEMUTUSKAN: menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat yang tumbuh sebagai akibat perkembangan pilitik diwaktu yang akhir-akhir ini dengan cara INTEGRAL dan program yang tertentu.”

Pemerintah ternyata menyambut Mosi Integral tersebut dengan tangan terbuka. Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan Mosi Integral Natsir sebagai pedoman dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya 19 Mei 1950 diadakanlah perundingan pemerintah RIS dan RI yang merupakan implementasi dari mosi integral Muhammad Natsir tersebut. Perundingan itu menghasilkan: Kedua belah pihak menyetujui dalam waktu singkat bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari pada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, Menyetujui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan dengan menambah Konstitusi RIS sedemikian rupa. Diantaranya adalah penambahan tentang hak milik sebagai fungsi sosial, penghapusan Senat, penetapan DPR, dan penunjukan Presiden, Menyetujui yang menjadi Presiden adalah Ir. Soekarno dan Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer, Menyetujui pembentukan suatu panitia yang berkewajiban melaksanakan segala persetujuan antara RIS dan RI dengan cara diajukan oleh pemerintahnya masing-masing. Maka Pemerintah RIS dan RI bubar dan Presiden Mengusahakan pembentukan

Pemerintahan baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 presiden Soekarno mengumumkan resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu ada dampak dari mosi integral Muhammad Natsir tersebut yaitu: pembubaran negara bagian, pembentukan kembali negara kesatuan, perubahan konstitusi, dan perubahan sistem pemerintah menjadi parlementer,

D.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kondisi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan masa di mana negara mengalami perpecahan, negara di pecah belah menjadi beberapa bagian hal ini merupakan salah satu keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Awalnya negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi setelah Belanda menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia hal tersebut menimbulkan ketegangan antara Belanda dan Indonesia sehingga terjadilah perebutan wilayah maupun pertempuran. Dalam mengatasi itu PBB mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda yaitu diselenggarakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan terbentuklah Negara Republik

Indonesia Serikat (RIS). Negara di bagi menjadi 16 bagian, sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang karena banyak masyarakat yang melakukan gerakan persatuan mereka menganggap sistem federal adalah warisan kolonial. Sehingga negara bergejolak, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai wilayah selain itu terjadi juga kekacauan dimana-mana yang membuat polisi harus bertindak.

Pemikiran Muhammad Natsir dalam memperjuangkan konsep negara RIS ke NKRI, pemikiran ini disebabkan karena M. Natsir menyaksikan resolusi-resolusi negara bagian maupun demonstrasi yang terjadi di mana-mana yang diakibatkan oleh terbentuk negara RIS. Sebagai ketua fraksi Masyumi di parlemen Republik Indonesia Serikat, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin fraksi lain. Selama dua setengah bulan M. Natsir melakukan pembicaraan dan lobi dengan fraksi semua negara bagian kemudian Muhammad Natsir mengajukan gagasan agar semua negara-negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya. Adapun cara yang ditempuh adalah semua negara bagian sama-sama membentuk

Negara Kesatuan dengan jalan semua negara bagian harus membubarkan diri masing-masing. Usul Muhammad Natsir tersebut dianggap masuk akal sehingga dengan mudah diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS dan sebagai komitmen atas penerimaan gagasan Muhammad Natsir tersebut maka 11 anggota DPR RIS dari berbagai fraksi memberikan dukungan tandatangan untuk diajukan dalam sidang pada tanggal 3 April 1950, Muhammad Natsir tampil di podium sidang paripurna Parlemen RIS untuk menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir.

Implementasi dari Pemikiran Muhammad Natsir adalah Kedua belah pihak menyetujui dalam waktu singkat bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari pada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, Menyetujui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan dengan menambah Konstitusi RIS sedemikian rupa. Diantaranya adalah penambahan tentang hak milik sebagai fungsi sosial, penghapusan senat, penetapan DPR, dan penunjukan Presiden, Menyetujui yang menjadi Presiden adalah Ir. Soekarno dan Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer, Menyetujui pembentukan suatu panitia yang berkewajiban melaksanakan segala

persetujuan antara RIS dan RI dengan cara diajukan oleh pemerintahnya masing-masing. Maka Pemerintah RIS dan RI bubar dan Presiden Mengusahakan pembentukan Pemerintahan baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat gabungan DPR RIS dan senat. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian hanya kurang lebih 4 setengah bulan dari pencetusan tentang “ Mosi Integral “ Muhammad Natsir tanggal 3 April 1950 maka Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) telah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dampak dari Mosi Integral tersebut adalah adanya pembubaran negara bagian, pembentukan kembali negara kesatuan, terjadinya perubahan Konstitusi dan perubahan sistem pemerintahan

Daftar Rujukan

- Moedjanto, *Indonesia Abad ke- 20*.
Yogyakarta: Kansius
- Murjoko Ahmad. 2020.*Mosi Integral Natsir 1950*, Bandung : Persis Pers

Natsir. M. 1957. *Capita selecta 2*. Djakarta: Pustaka Pendis

Rifcklefs.M.C1991.*Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta:GadjahMada University Press

Tabroni Roni. 2017. *Komunikasi Politik M. Natsir*. Yogyakarta Suluh Media

Rinardi Haryono.2017. *Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia*”. Vol 2, No. 1